

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan gejala Masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman.¹ Menurut L.Bayley “korupsi” dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.² Perbuatan tindak pidana korupsi termasuk pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi Masyarakat, sehingga korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Seperti contoh pada kasus korupsi dengan perkara nomor: 15/PID.B/2002/PN.SRG yang dilakukan oleh Ketua KUD Banaran, dengan mendapatkan bantuan kredit dari pemerintahan berupa dana pengadaan pangan, Kredit Usaha Tani, dan Hortikultura. Dengan adanya bantuan tersebut Ketua KUD Banaran telah menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan untuk

¹ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Jakarta: Mandar Maju, hal7.

² *Ibid* .hal 9.

kepentingan dirinya sendiri yang seharusnya disalurkan kepada kelompok Tani. Telah menggunakan keuangan KUD Banaran sebesar Rp. 163.137.300,-.

Dengan rincian:

- 1) Dana kredit usaha tani dari kelompok tani Sri Rejeki yang tidak disalurkan sebesar Rp.114.169.300
- 2) Dana dari hasil penjualan pupuk kredit usaha tani yang tidak diambil petani sebesar Rp. 35.078.790
- 3) Dana dari angsuran kredit usaha tani yang tidak disetorkan sebesar Rp. 13.889.220

Ketua KUD Banaran menggunakan dana Kredit Usaha Tani sejumlah tersebut memindahkannya kepada usaha lain bukan padi dan Hortikultura sebagaimana kredit yang diterima, tetapi menyerahkan pihak ketiga untuk usaha perkayuan, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih. Penggunaan uang tersebut dilakukan Ketua KUD Banaran tanpa mendapat persetujuan tertulis dari pengurus KUD maupun dari Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Sragen sebagai pengawas dari KUD Banaran.

Berdasarkan fakta fakta tersebut Ketua KUD Banaran terbukti bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan hukum yang dapat menghapuskan perbuatannya maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus ini hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan korupsi tersebut merugikan keuangan Negara.
- 2) Hal-hal yang meringankan:
 - a. Secara terus terang pelaku perbuatan korupsi tersebut menyesal atas perbuatannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Pelaku Korupsi tersebut adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana disebutkan dalam dictum Putusan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, menghukum dengan hukuman penjara 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.8.000.000,-

Pada kenyataannya selama hukuman penjara berlangsung ketua KUD Banaran tidak membayar ganti rugi kepada negara oleh karena itu kepala Kejaksaan Negeri Sragen selaku perorangan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sragen. Berdasarkan Pasal 274 KUHP menyatakan bahwa

“Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata”.

Pasal 99 yang menyatakan bahwa *“Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap”.*

Adapun alasan penguat mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan tergugat sengaja tidak menunaikan kewajiban pembayaran uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUHPerdata menentukan sebagai berikut *“ Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat menimbulkan kerugian bagi penggugat berupa kerugian materiil yaitu keharusan membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 148.137.300 belum dilaksanakan sampai gugatan ini diajukan tergugat belum membayar uang pengganti tersebut. Kewajiban hukum tergugat untuk membayar uang pengganti kepada negara tersebut lahir dari undang-undang dan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga tergugat harus mematuhi isi putusan tersebut. Kewajiban kerugian immateriil, penggugat mengalami kerugian

immateriil selalu mendapat teguran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berniat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum. Yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu **“PROSES PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI ATAS PUTUSAN PIDANA KE DALAM PUTUSAN PERDATA”**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan di teliti yang antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan perdata atas perkara korupsi yang telah dijatuhi Putusan pidana?
2. Bagaimana akibat hukum setelah Putusan pidana dijatuhkan Putusan perdata atas perkara korupsi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan Putusan perdata atas perkara korupsi yang telah dijatuhi Putusan pidana.
2. Untuk mengetahui akibat hukum setelah Putusan pidana dijatuhkan Putusan perdata atas perkara korupsi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara umum, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara korupsi atas putusan pidana kedalam putusan perdata.

2. Manfaat Bagi Pribadi Penulis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai proses tentang penyelesaian perkara korupsi atas putusan pidana kedalam putusan erdata.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada Masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk warga masyarakat dalam menyelesaikan perkara korupsi atas utusan pidana kedalam putusan perdata.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, disebut juga hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, acap kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan menganalisis aspek-aspek hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara korupsi atas Putusan pidana kedalam Putusan perdata.

2. Jenis Penelitian

Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif, karena bermaksud untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang hal-hal yang terkait dengan

objek yang diteliti, yaitu mengenai proses penyelesaian perkara perdata atas putusan hakim pidana kedalam putusan perdata.

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sebagai sumber datanya yang digunakan data primer dan data sekunder. Adapun data-data dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Sekunder

Data sekunder tersebut dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, melalui penelitian.³ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).
- c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Jurisprudensi (Keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap).

2) Bahan Hukum Sekunder

³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, Hal 12.

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perdata, buku tentang perbuatan melawan hukum, buku tentang ganti rugi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan proses penyelesaian perkara perdata atas putusan hakim pidana dalam perkara korupsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

b. Data primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lapangan.

1) Lokasi penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sragen. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai proses penyelesaian perkara perdata atas putusan hakim pidana dalam perkara korupsi. Dan pemilihan wilayah di Kota Sragen itu sendiri supaya mudah dijangkau oleh peneliti, karena peneliti berdomisili di Wilayah

Sragen, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan penelitian ini.

2) Subyek penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu dengan informasi dan responden yang berkompeten dalam proses penyelesaian perkara perdata atas Putusan Hakim pidana dalam perkara korupsi, yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Sragen.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yakni:

a. Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

b. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh penulis melalui:

1) Studi Lapangan

Studi Lapangan diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung dengan cara sebagai berikut:

a) Daftar Pertanyaan (Questionnaire)

Merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang disampaikan secara tertulis.⁴Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, tersusun secara urut dan sistematis.

b) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode dimana interviewer (Pewawancara) bertatap muka langsung dengan responden untuk melakukan Tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵Dalam hal ini Peneliti bertindak sebagai Interviewer dan yang menjadi responden atau narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Negeri Sragen.

5. Metode Analisis Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif dengan menganalisis data yang meliputi putusan pengadilan, peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara korupsi atas Putusan pidana kedalam Putusan perdata, yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden,

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hal 89-90.

⁵ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal 127.

kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

F.Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab Pertama terdiri dari pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab Kedua adalah tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan umum tentang perkara pidana yang diajukan gugatan perdata,

Bab Ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang memuat pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perdata atas perkara korupsi yang telah dijatuhi putusan pidana, dan akibat hukum setelah putusan pidana dijatuhkan putusan perdata atas perkara korupsi tersebut.

Adapun bab yang keempat adalah Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.